

Pemberdayaan Krama Desa dalam Pelestarian Budaya Bali Perspektif Ajeg Bali

I Wayan Joniarta^{1*}, Melati Budi Srikandi², Nuning Indah Pratiwi³

¹⁻³ Universitas Pendidikan Nasional

* wayanjoniarta@undiknas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji korelasi antara pemberdayaan krama desa dan pelestarian budaya Bali. Fenomena yang menarik untuk diteliti, era globalisasi menyebabkan masuknya budaya asing cenderung berdampak pada terabaikannya budaya lokal. Nilai-nilai budaya yang bersumber pada kearifan lokal dan kebudayaan suku bangsa dengan masuknya unsur-unsur budaya asing dalam interaksi kebudayaan lintas bangsa, menyebabkan masyarakat cenderung abai terhadap nilai-nilai budaya lokal. Pada sisi lain, gaung tentang pelestarian budaya Bali dengan jargon “Ajeg Bali” telah dikumandangkan sejak lama, terlihat pada kepemimpinan (Gubernur) Bali yaitu Dewa Beratha, Mangku Pastika, dan I Wayan Koster. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui teknik dokumentasi, wawancara dan observasi langsung ke lokasi yang menjadi obyek utama penelitian yaitu di Desa Pakraman Marga yang terdiri dari Banjar Lebah, Banjar Basa, Banjar Tembau dan Banjar Beng. Disamping observasi langsung, penelitian ini juga menggunakan observasi partisipasi artinya peneliti ikut serta larut dalam aktivitas budaya di desa pakraman Marga. Hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan aktor baik pemerinah desa dinas maupun pengurus adat terhadap upaya pemberdayaan krama dan pelestarian budaya Bali. Kemudian adanya kesadaran krama cukup dalam mengikuti aktivitas budaya seperti sebagai penari rejang, ritual keagamaan, ritual kematian, sebagai sekehe santi, dan sekehe gong.

Kata Kunci: *pemberdayaan krama desa, pelestarian budaya, Ajeg*

Pendahuluan

Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa, mempunyai budaya, keyakinan, bahasa daerah, adat istiadat yang tentunya masih menarik untuk dikaji. Dari keberagaman tersebut mengandung konsekuensi bahwa Indonesia memiliki sumberdaya kebudayaan yang sangat beragam pula. Karena sebagai negara kesatuan, Indonesia memerlukan perumusan untuk menguatkan daya tahan budaya lokal sebagai modal sosial dalam masyarakat masa kini. Sebenarnya sudah diamanatkan oleh UUD 1945, tersurat dan tersirat pada pasal 32 ayat 1 nya bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Mencermati amanat pasal 32 ayat 1 UUD 1945 tersebut dapat dipahami bahwa budaya suatu masyarakat cenderung diupayakan untuk dilestarikan bersama antara masyarakat secara berkelanjutan. Cukuplah logis bila ada ungkapan budaya dibuat oleh masyarakat, tidak ada masyarakat tanpa budaya, berarti hampir segala aktivitas manusia adalah mengacu budaya yang dianutnya. UU No. 32 tahun 2004 tentang azas desentralisasi “memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan regulasi bersifat lokal mengenai

pelaksanaan pelestarian kebudayaan di suatu daerah. Strategi penerbitan peraturan daerah bertujuan untuk melindungi budaya local secara hukum dan menjamin kelestarian kebudayaan sebagai sumber daya budaya”.

Upaya pelestarian budaya Bali kerap muncul melalui Jargon Ajeg Bali, sebenarnya tidak asing bagi masyarakat Bali. Kata tersebut kerap muncul dikalangan pejabat pemerintah, pertemuan-pertemuan ilmiah, koran, tabloid, media radio, TV atau media sosial lainnya bahkan obrolan di Balai Banjar (di Bali), kata tersebut seolah melekat sebagai pelengkap setiap perbincangan mereka. Suryawan, Dwipayana dikutip oleh Joniarta (2007) menyebutkan “...budaya Bali yang ajeg menggambarkan ; kokoh, kukuh, tetap, tegar”. Ini berarti Ajeg Bali dikonotasikan : tidak goyah, tegak, dan lestari. Jargon Ajeg Bali amat memiliki pengaruh dan kekuatan untuk mendorong masyarakat Bali agar dapat bersatu mempertahankan budaya Bali. Bahkan semasa Dewa Beratha (Gubernur Bali) telah melakukan “penandatanganan prasasti Ajeg Bali keseluruh kabupaten se Bali, dilakukan saat ulang tahun pertama Bali TV, selanjutnya pertengahan bulan Juli 2003 dilakukan roadshow keseluruh kabupaten di Bali untuk penanda tanganan prasasti Ajeg Bali oleh Bupati dan Wali Kota se Bali”. (Joniarta, 2015).

Berbagai lapisan masyarakat sepertinya bangga apabila setiap momen tertentu mengangkat judul acaranya menyelipkan kata *Ajeg Bali* tersebut. Intinya kebudayaan Bali, adat istiadatnya diharapkan tetap bertahan sehingga tidak punah. Perlu diperhatikan pelestarian budaya agar terhindar dari kepunahan semestinya ditumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terdorong rasa memiliki budaya. Tetapi *patut* dipahami, teriring perkembangan dan kemajuan teknologi cendrung mempengaruhi kebudayaan yang sudah menyatu dengan masyarakat. Disisi lain muncul *jargon* untuk melestarikan budaya tradisional, dengan cara ; mempertahankan, menjaga, memelihara, melindungi budaya yang sifatnya tradisional, seperti terkumandangnya jargon *Ajeg Bali* pada sebagian besar lapisan masyarakat Bali. Apakah semudah itu ?, seperti dikatakan oleh Triwardani, dkk (2014) “ nilai-nilai budaya yang bersumber pada kearifan lokal dan kebudayaan suku bangsa dengan masuknya unsur-unsur budaya asing dalam interaksi kebudayaan lintas bangsa, menyebabkan masyarakat cendrung abai terhadap nilai-nilai budaya lokal”. (Triwardani & Christina, 2014).

Dian Tarakanita melakukan penelitian yang berjudul Peran Komunitas Pojok Budaya Dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Melalui Cultural Tourism di Bantul. Penelitian ini berkesimpulan: *Pertama*, Komunitas Pojok Budaya merupakan komunitas yang bergerak dalam bidang pelestarian budaya Jawa khususnya permainan tradisional di Dusun Sewon atau yang dikenal dengan sebutan kampung dolanan. Komunitas memprakarsai program *cultural tourism* dengan kegiatan utama melalui outbond. Kegiatan wisata budaya ini selain pelestarian, aktivitas komunitas juga dititik beratkan pada perlindungan dan pemanfaatan makna yang terkandung dalam permainan tradisional Jawa. *Kedua*, seiring berjalannya waktu, bentuk komunitas yang tidak mempunyai struktur organisasi sistematis, menjadikan banyak anggota organisasi tidak lagi aktif dalam kegiatan komunitas. Walaupun banyak anggota pasif, masih ada pula anggota yang berperan aktif menggerakkan komunitas sehingga tetap eksis hingga tahun ke 10 ini. (Tarakanita, 2017).

Penelitian lain dilakukan oleh Andriyani, dkk termuat pada Jurnal Ketahanan Nasional ISSN 0853-9340, Volume 23 No. 1 27 April 2017, hal 1-16, berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di DesaWisata Penglipusan Bali)”. Hasil penelitian

memperlihatkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat di desa wisata Penglipuran berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pemberian daya. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi". Ternyata terdapat "kendala-kendala dalam pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan usaha mempertahankan budaya dan adat istiadat dari arus modernisasi, sikap masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia dan ketersediaan akomodasi wisata serta kurangnya kegiatan promosi. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata memberikan implikasi terhadap ketahanan sosial budaya wilayah berupa penguatan dan beberapa perubahan pada tata nilai sosial, budaya dan lingkungan. (Andriyani, 2014).

Ternyata eksistensi komunitas Pojok Budaya dipengaruhi oleh faktor kreativitas dari komunitas itu sendiri. Mereka tidak bergantung pada pihak lain dalam penyediaan dana kegiatan. Sarana prasarana yang tersedia dilingkungan sekitar sehingga tidaklah sulit bagi komunitas Pojok Budaya untuk menjalankan kegiatannya.

Amat dilematis menghadapi arus globalisasi, masyarakat era sekarang cenderung individual, dalam berinteraksi cenderung mengabaikan tatap muka langsung, misalnya; era komunikasi melalui media social seperti face book, line, twiter, SMS, WhatsApp, dan sebagainya, sungguh ironis "*yang jauh dekat, yang dekat jauh*". Fakta yang kerap terjadi pada saat orang duduk berdampingan justru cenderung *chatting* kepada mereka yang jauh, bukan diskusi kepada orang disampingnya. Menyampaikan undangan tentang hajatan seperti upacara pernikahan, potong gisi, *telu bulanan* (di Bali), upacara agama lainnya hanya melalui media social (sebelumnya justru dianggap tidak etis). Selain itu busana adat Bali ke Pura terkadang *transparan* (terutama perempuan) sehingga terkesan mengganggu konsentrasi sembahyang. Tarian yang sifatnya sakral seperti *Joged bumbung* (Bali) yang merupakan tarian pergaulan dan mengandung pendidikan justru ada yang *bernuansa porno*, dengan goyangnya tidak sopan, justru *menular* pada anak-anak di bawah umur. Kondisi tersebut cenderung disebabkan oleh faktor globalisasi sehingga budaya luar (barat) telah masuk ke wilayah pedesaan. Thoyibi dikutip Sutiyono dan Seriati (Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 18 No. 1 April 2013: 30-38) bahwa "Disisi lain budaya local dianggap statis dan tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan dan ekspresi masyarakat local, sementara hadirnya budaya barat dianggap dinamis dan dianggap lebih sesuai dengan karakter masyarakat sekarang".(Sutiyono & Seriati, 2013)

Bali yang terkenal dengan *jargon Ajeg Bali*. Setiap aktivitasnya diharapkan selaras dengan ajaran agama Hindu dan kehidupan adat, budaya Bali, dan bertumpu pada konsep *Tri Hita Karana*, merupakan falsafah yang percaya pada tiga aspek yang menyebabkan hubungan harmonis dan menimbulkan kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan. Ke tiga aspek tersebut adalah ; *Parahyangan* (hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan harmonis dengan sesama manusia), *palemahan* (hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungannya). Perlu dicermati "Desa di Bali khususnya desa adat/*pakraman* sering dipersepsikan sebagai sebuah lembaga non formal yang relative demokratis dan otonom sehingga sama sekali merdeka dari kekuatan lain diluarnya". (Suacana, 2010)

Tantangan yang amat serius dihadapi budaya lokal yaitu mempertahankan eksistensi, namun disisi lain tak bisa lepas dari arus globalisasi. Perkataan lain bahwa kemajuan teknologi informasi cenderung menyebabkan masuknya budaya asing, justru akan turut mempengaruhi kebudayaan daerah. Masyarakat (di Bali dikenal sebutan *krama*) merupakan

salah satu factor penentu pelestarian budaya, oleh karena itu pentingnya pemberdayaan *krama* agar menghindari dan meminimalisir budaya asing yang kurang sesuai dengan budaya bangsa, yang akan mengancam eksistensi budaya local. *Ajeg Bali* merupakan *jargon* untuk menguatkan daya tahan budaya local sebagai modal social dalam masyarakat masa kini.

Penelitian ini mengkaji berlangsungnya pemberdayaan masyarakat dalam melestarikan budaya lokal Bali perspektif *Ajeg Bali*, meliputi : 1) Peran Aktor dalam Pemberdayaan Krama Desa Pakraman Marga; 2) Uger Di Desa Pakraman Marga. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk pemberdayaan *krama* desa Pakraman Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dalam pelestarian budaya Bali terutama dari perspektif *Ajeg Bali*.

Topik ini menarik untuk diteliti dengan alasan di era otonomi daerah ini nampak ada upaya dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menguatkan pelestarian budaya Bali, tercermin pada kepemimpinan Gubernur dalam beberapa periode, yaitu era Dewa Beratha, era Mangku Pastika dan era sekarang tahun 2018-2023 yaitu I Wayan Koster dengan membangkitkan kembali upaya pelestarian budaya Bali melalui program yang menitik beratkan pada *Ajeg Bali*. Beberapa gebrakan semenjak kepemimpinan I Wayan Koster seperti : mengefektifkan bahasa Bali pada sekolah-sekolah (setiap hari Kamis), mewajibkan pegawai setiap kantor, sekolah-sekolah berpakaian adat Bali setiap Purnama, *tilem* dan hari Kamis.

Metode

Pengumpulan informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya Bali Perspektif *Ajeg Bali* . Disamping hal tersebut peneliti menggali informasi dari literatur, hasil penelitian, jurnal yang telah ada sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang perlu atau tidaknya permasalahan tersebut diangkat dalam penelitian ini.

Setelah mendapatkan informasi berdasarkan hasil studi kepustakaan, berupa jurnal, literatur, hasil penelitian maupun kajian ilmiah lainnya maka ditetapkan topik dalam penelitian ini yaitu “Pemberdayaan Krama Desa Dalam Pelestarian Budaya Bali Perspektif Ajeg Bali (Kasus Di Desa *Pakraman* Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan Provinsi Bali)”. Pada dasarnya penelitian tentang pemberdayaan *krama* dikorelasikan dengan pelestarian budaya Bali bisa dilaksanakan dimanapun di Bali ini. Semua kabupaten atau kota di Bali mempunyai desa yang cenderung bernaifaskan Agama Hindu. *Uger* sebagai pengurus pura secara turun temurun tetap dihargai walaupun telah terjadi penyeragaman Desa Adat. Oleh karena itu Desa Pakraman Marga dianggap representatif dipilih sebagai lokasi penelitian ini.

Lebih lanjut Miles dan Huberman (dalam Sugiono) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu : reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*concluding drawing/verivication*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan menggunakan analisis dengan model interaktif. Model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016) bahwa “model interaktif terdiri dari tiga tahap yaitu: reduksi data, penajian data, penarikan kesimpulan”. (Sugiyono, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Peran Aktor Pemberdayaan

Aktor pemberdayaan *krama* desa akhir-akhir ini menjadi penting peranannya untuk mendorong *krama* dalam pelestarian budaya Bali. Mengingat hampir setiap pergantian kepemimpinan di Bali kerap mengumandangkan upaya melestarikan budaya Bali. Sudah disebutkan pada latar belakang bahwa kepemimpinan Gubernur Bali (Dewa Beratha) telah melakukan penandatanganan prasasti *Ajag Bali* keseluruhan kabupaten se Bali, dilakukan saat ulang tahun pertama Bali TV, selanjutnya pertengahan bulan Juli 2003 dilakukan roadshow keseluruhan kabupaten di Bali untuk penanda tanganan prasasti *Ajag Bali* oleh Bupati dan Wali Kota se Bali. Selanjutnya dalam masa pemerintahan Mangku Pastika (Gubernur Bali) lebih memantapkan upaya pelestarian budaya Bali berdasar Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 tahun 2014 tentang Pelestarian warisan budaya Bali, dalam Ketentuan Umum pasal 1 poin 5 menyatakan “....Pelestarian adalah kegiatan perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya Bali”. Pada pemerintahan Koster (Gubernur Bali 2018-2023) disampaikan pada acara Kongres Kebudayaan Bali III tahun 2018 di Wisma Saba Utama Kantor Gubernur Bali, Selasa 4/12/ 2018, dinyatakan bahwa “kekayaan utama Bali adalah kebudayaan yang tidak ada habisnya, jadi itu harus terus digali dan dilestarikan”.

Desa *Pakraman* Marga merupakan desa yang strategis yang bernaung di pusat wilayah Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Desa ini merupakan desa yang paling dekat dengan Kantor Camat Marga, dan menjadi lintasan menuju Monumen/Tugu /Candi Pahlawan Marga Rana. Paling tidak aktivitas sehari-harinya Desa *Pakraman* Marga sering disaksikan oleh masyarakat umum tentang potensi budaya yang dimiliki dan dilaksanakan oleh *krama* Desa Marga. Aktivitas budaya yang dilangsungkan di Desa *Pakraman* Marga semuanya tak lepas dari peranan aktor, dalam mengupayakan pemberdayaan *krama* untuk melestarikan budaya apalagi *jargon Ajag Bali* telah sering dikumandangkan oleh pemimpin Bali tercinta ini.

Peranan aktor juga penting sebagai mediator dan motivator dalam melestarikan budaya Bali. Pemerintah yang secara konkrit ikut mengupayakan pemberdayaan *krama* desa dalam upaya melestarikan budaya Bali di desa *pakraman* Marga tersebut. Upaya-upaya konkrit yang telah dilakukan diantaranya dengan cara memberikan motivasi kepada *sekehe-kekehe* yang ada di Desa *Pakraman* Marga. Motivasi tersebut dilakukan dengan memberikan dana, pakaian, dan fasilitas lainnya sesuai kebutuhan *sekehe*. Masing-masing *sekehe* membuat proposal tentang anggaran yang diperlukan. Informasi yang diperoleh dari pengurus *sekehe* yang ada di Desa *Pakraman* Marga.

Dana tersebut sebagai bentuk motivasi kepada setiap anggota *sekehe* agar tumbuh rasa semangat untuk berlatih, dan ada dorongan untuk berkompetisi antara *sekehe* yang ada di Desa *Pakraman* Marga. Umpamanya yang menjadi handalan *sekehe santi* adalah *tembangnya* yang bagus dan cara membaca cerita tepat sesuai *guru-lagu* sehingga mendapat pujian dari *krama* yang mendengarkan. Begitu pula irama *gambelan*, memotivasi *sekehe* gong untuk berlatih maksimal agar tumbuh percaya diri dalam pentas, karena akan disaksikan oleh banyak *krama*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal sumbangan terhadap masing-masing *sekehe* tidak jauh berbeda. Artinya sumbangan hampir sama antara *sekehe* yang sama, misal *sekehe santi* masing-masing banjar mendapatkan sumbangan yang sama yaitu

masing-masing Rp. 5.000.000,- Di antara *sekehe gong* ke empat banjar juga mendapatkan perlakuan yang sama, misalnya *sekehe gong* tidak akan ragu berlatih kalau terjadi kerusakan pada fasilitas *gambelan*. Bila timbul kerusakan pada peralatan gong akan ditanggung biayanya oleh banjar bukan oleh *sekehe*. Sebab pernah terjadi kerusakan fasilitas biayanya dibebankan kepada *sekehe gong* dengan alasan "*ongkos megambel masuk kas sekehe, bebarti bila ada kerusakan sekehe gonglah yang membiayai*" sehingga *sekehe gong* bubar karena merasa tidak sanggup mendanai kerusakan *gong*. Bubarnya *sekehe gong* berdampak menambah rusaknya fasilitas, misalnya kayu, bambunya dimakan rayap. Disamping itu bila ada *krama* memerlukan gong pada saat upacara misalnya pelaksanaan *ritual odalan*, kematian, bila ngupah gong ke luar desa dan ongkosnya relative mahal. Berdasarkan hasil *parum banjar* disepakati kerusakan fasilitas gong biayanya ditanggung *krama banjar*. Ini merupakan salah satu indikasi menambah semangatnya *krama* menjadi anggota *sekehe gong*.

Disamping *sekehe gong* dan *sekehe santi* setiap banjar di Desa Pakraman Marga, terdapat *krama* yang ditunjuk pada waktu-waktu tertentu untuk mengikuti kegiatan, seperti menyambut Hari Raya Nyepi. Pada konteks ini klian adat dan klian dinas masing-masing banjar juga tak kecil peranannya dalam mendorong minat *krama* untuk ikut berpartisipasi dalam menyambut Hari Raya umat Hindu. Paling tidak tiga bulan sebelum Hari Raya Nyepi setiap banjar harus mempersiapkan diri untuk mengikuti parade ogoh-ogoh. Oleh karena itulah *krama banjar* melalui *sekehe teruna* sudah mulai menggali dana, biasanya dengan menyelenggarakan Bazar, turnamen ceki, sabungan ayam, membuat baju bertuliskan identitas banjar (dan dijual kepada KK dan anggota keluarganya). Setiap krama merasa wajib membeli baju, karena baju dimaksud akan dipakai pada saat parade ogoh-ogoh, dan menunjukkan identitas masing-masing banjar. Dana yang terkumpul digunakan untuk pembuatan ogoh-ogoh, biaya latihan penari, *bleganjur*, dan lain-lain. Pada dasarnya untuk meringankan beban biaya kepada masing-masing *krama*, sebab pembuatan *ogoh-ogoh*, latihan penari, *bleganjur* dan sampai terselenggaranya *parade ogoh-ogoh* setiap banjar bisa menghabiskan dana antara Rp.15.000.000,- sampai Rp. 50.000.000,-.

Berdasarkan pengamatan, *krama banjar* bukan hanya orang dewasa saja yang berpartisipasi tetapi dari anak-anak setingkat Sekolah Dasar, para remaja, dan *krama banjar* (sudah berkeluarga) bersemangat ikut mendukung demi kelancaran parade ogoh-ogoh. Sehingga terjadi kolaborasi parade, *bleganjur* diperankan oleh anak-anak dan *sekehe teruna*, yang menggotong ogoh-ogoh adalah *krama banjar*. Hal tersebut merupakan kesepakatan bersama sehingga pada hari "H" nya berjalan lancar. Tarian ritual berupa rejang, pesertanya adalah ibu-ibu. Dalam kesibukannya sebagai ibu rumah tangga dan terkadang sebagai tulang punggung keluarga dari sisi ekonomi. Aktor lokal (tokoh-tokoh adat) di Desa Marga dengan berbagai upaya meminta ketulusan hati dan keiklasan ibu-ibu untuk mau menjadi penari *rejang*. "Gayung bersambut", Ibu-ibu tanpa canggung untuk mendaftarkan diri ikut sebagai penari *rejang* dimaksud.

Mencermati uraian di atas ternyata untuk melestarikan suatu budaya mengalami dilema, disatu sisi perkembangan teknologi seperti mode bisa menimbulkan daya tarik untuk mengikutinya, disisi lain kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang dituntut untuk dilestarikan, apalagi Bali primadonanya adalah budaya dan keunikan budayanya, yang menjadikan turis manca negara berkunjung ke Bali. Pernah terungkap orang asing menyatakan "*Bali adalah Surganya dunia*" sehingga ada anggapan tamu asing "*hidup ini belum lengkap kalau belum pernah ke Bali*" Oleh karena itulah *krama* Bali perlu

diberdayakan agar budayanya bisa lestari. Bila turis banyak berkunjung ke Bali secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan devisa negara.

Uger (Pasca Penyeragaman Desa Adat di Bali)

Pada pemerinahan Orde Baru, di Bali terjadi penyeragaman Desa Adat. Sebelum penyeragaman desa adat pengurus masing-masing pura disebut Uger, yaitu orang-orang yang secara turun temurun berkedudukan sebagai pengurus Pura. Di Desa Pakraman Marga terdapat anggota krama yang disebut *uger*, artinya anggota *krama* yang secara turun temurun ditunjuk untuk bertugas sebagai memimpin segala prosesi yang berkaitan dengan odalan, seperti sebagai pengenter (bertugas sebagai koordinator), juru songsong (bertugas *menjinjing pretima*). Beberapa uger yang diketahui adalah: 1) Pan Sada, 2) I Wayan Sumidra, 3) Pan Sukaja, 4) Pan Sudiana, 5) I Wayan Suda dengan panggilan Pak Mirah.

Era Orde Baru mulai penyeragaman tentang adat di Bali. Wilayah desa adat serta batas-batasnya diatur, sehingga *pawongan* (manusia), *palemahan* (wilayah) dan *parahyangan* (pura) menjadi diatur oleh desa. Karena pura yang tergolong dalam *Tri Kahyangan* yaitu *Pura Dalem*, *Pura Puseh* dan *Pura Bale Agung* sebagai syatrat desa adat maka segala yang berkaitan dengan aktivitas pura di koordinir oleh Bendesa Adat, dan Bendesa Adat berdasarkan kesepakatan krama desa menunjuk sekretaris, bendahara dan pembantu-pembantu lainnya yang dipandang perlu untuk mendukung aktivitas desa adat. Bagaimana dengan uger? Mereka melaksanakan fungsi dan tugas khusus dalam kaitannya dengan aktivitas di pura saja, seperti memasang *wastra pelinggih*, mengkoordinir prosesi odalan khusus diareal *pelinggih* (pura) saja.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa di Bali sudah berlangsung adat istiadat secara turun temurun, namun karena ada penyeragaman maka ada beberapa hal yang bergeser seperti organisasi adat menyesuaikan dengan organisasi formal sehingga seolah-olah muncul negaranisasi desa *pakraman*, artinya organisasi adat menyesuaikan dengan pemerintah nasional yaitu pimpinan puncaknya adalah Bendesa Adat, ada Sekretaris, Bendahara, *pecalang* sebagai polisinya desa *pakraman* dan lain-lain yang diperlukan dalam memperlancar pencapaian tujuan organisasi. Disamping organisasi desa *Pakraman* Marga, masih menghargai warisan leluhur yaitu tetap memberi kedudukan kepada uger yang ada di Desa *Pakraman* Marga. Uger, pemangku dan karma masih percaya unsur *niskala*, artinya masih percaya pada yang tidak kelihatan.

Kesimpulan

Desa *Pakraman* Marga merupakan salah satu desa *pakraman* di Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Dalam upaya pelestarian budaya Bali ibarat air mengalir dimana *Jargon Ajeg* Bali dikumandangkan oleh para pejabat Daerah seperti Gubernur dan tataran pejabat di bawahnya seperti Bupati se Bali dan Wali Kota dan merambah ke masyarakat tingkat bawah yaitu wilayah desa. Sebagai upaya mendukung *jargon Ajeg* Bali, pada intinya mengarah pada lestarinya (kokoh, ajeg, kuat, tak punah) budaya Bali tersebut, dilakukan melalui pemberdayaan *krama* desa. Strategi pemberdayaan *krama* desa dilakukan dengan : *darma tula*, pelatihan, *pasraman*, dan kontribusi aktor sebagai motivator dan berupa bantuan fasilitas maupun dana oleh pemerintah pada kegiatan-kegiatan *krama* desa. Namun terkadang darma tula bernada mengancam, missal : a) bagi krama yang tidak terdaftar di buku besar adat akan tidak dilayani bila memerlukan pemangku, nunas tirta Tri Kayangan. b)

bagi karma yang melanggar busana adat ke pura ditegur dan dipulangkan oleh pecalang. Terdapat beberapa hal yang perlu diluruskan dalam upaya Pemberdayaan Desa *Pakraman* Marga dalam upaya pelestarian budaya Bali, sehingga *krama* menyadari bahwa ada penyimpangan perilaku seiring upaya pelestarian budaya seperti masalah pakaian adat ke pura, kesadaran mendaftarkan diri sebagai *krama* adat.

Referensi

- Andriyani, A. A. I. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali) . *Jurnal Ketahanan Nasional*, 2(1), 46–56.
- Joniarta, I. W. (2015). Membangun Model Pemberdayaan Perempuan Miskin di Bali (Kajian Pemberdayaan Perempuan Miskin dalam Local Community di Bali. *Jurnal Opini*, 12(1), 64–69.
- Suacana, I. W. G. (2010). Transformasi Otonomi Dalam Tata Pemerintahan Desa Mengwi Kabupaten Badung . *Jurnal Ilmu Politik*, 21, 137–149.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sutiyono, & Seriati, N. N. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Melaksanakan Revitalisasi Budaya Lokal “Bersih Desa” di Ketingan Sleman. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1), 30–38.
- Tarakanita, D. (2017). Peran Komunitas Pojok Budaya Dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Melalui Cultural Tourism di Bantul. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 22(1), 45–56.
- Triwardani, R., & Christina, R. (2014). Implementasi Kebijakan Desa Budaya Dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal. *Jurnal Reformasi*, 4(2).